

LAPORAN KINERJA



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

TAHUN
2020

**AYO
MEMILIH!**



PENGANTAR KATA

Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2020 sebagai implementasi dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020 - 2024.

LK KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU untuk mencapai visi dan misi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan LK ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Gorontalo dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Harapan kami, LK KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020 ini dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja KPU Provinsi Gorontalo ke depan guna mewujudkan visi KPU Provinsi Gorontalo sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang LUBER dan JURDIL dalam rangka Mendukung Gorontalo Maju dan Sejahtera.

Gorontalo, Januari 2021

KETUA



FADLIYANTO KOEM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai lembaga yang mengelola anggaran negara yang diamanatkan oleh undang-undang menyelenggarakan Pemilu dan pemilihan, KPU Provinsi Gorontalo menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Gorontalo yang transparan dan akuntabilitas terhadap kinerja dan anggaran selang tahun 2020. Dalam LKj memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU RI, 3 (tiga) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Hal tersebut dievaluasi dan dianalisis capaian kinerja dapat dikatakan 100% kinerja dan 96% pencapaian realisasi anggaran. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Gorontalo kepada publik.

Dalam mencapai target kinerja tahun 2020, KPU Provinsi Gorontalo dihadapkan pada situasi yang tidak mudah dimasa pandemi COVID 19. melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango. pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tersebut tetap melakukan supervisi dan monitoring dengan standar Prosedur COVID 19, sehingga proses pelaksanaan tahapan terus dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada.

KPU Provinsi Gorontalo berkomitmen agar prestasi kinerja di lingkup KPU Provinsi Gorontalo dapat terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki, dengan harapan penyelenggaraan pemilihan di Gorontalo dapat semakin terpercaya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	
iii	
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 - 2024	11
B. RENCANA KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020.....	16
C. PERJANJIAN KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO.....	21
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KPU PROVINSI	25
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN KPU PROVINSI GORONTALO	59
BAB IV PENUTUP	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 ..	55
LAMPIRAN 2 : PENGUKURAN KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahunan 2020	16
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020	18
Tabel 2.3	Revisi Pagu Anggaran KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020.....	20
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020	22
Tabel 3.2	Indikator Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020	24
Tabel 3.3	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku pada tahun 2016-2020	28
Tabel 3.4	Partisipasi Pemilih Pilkada tahun 2020 di kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango.....	29
Tabel 3.5	Persentase partisipasi pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan pada tahun 2016 - 2024	30
Tabel 3.6	Persentase Partisipasi Pemilih perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan pada tahun 2016-2020	31
Tabel 3.7	Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pilkada tahun 2020.....	32
Tabel 3.8	Partisipasi Pemilih disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan serentak pada tahun 2020 Kabupaten Gorontalo Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango.....	33
Tabel 3.9	Persentase Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak dalam daftar pemilih tetap pada pemilu/pemilihan pada tahun 2016 - 2020	35
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU Provinsi Gorontalo, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik pada tahun 2016 -2020	37

Tabel 3.11	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2016-2020	39
Tabel 3.12	Jumlah kasus yang dimenangkan oleh KPU Provinsi Gorontalo dan Kabupaten / Kota se Provinsi Gorontalo Tahun 2016 – 2020	42
Tabel 3.13	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo pada tahun 2020-2024	43
Tabel 3.14	Kinerja Terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2016-2020	45
Tabel 3.15	Kinerja Terhadap Reviu Laporan Keuangan pada tahun 2016-2020	46
Tabel 3.16	Realisasi APBN Murni KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020	47
Tabel 3.17	Perbandingan Pagu dan Realisasi APBN Murni dan Hibah APBD Tahun Anggaran 2016-2020 KPU Provinsi Gorontalo	48
Tabel 3.18	Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran 2020.....	49

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Masa Jabatan 2020 - 2024	5
Grafik 1.2	Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	7
Grafik 1.3	Data Golongan dan Kepangkatan KPU Provinsi Gorontalo	9
Grafik 1.4	Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2020	9
Grafik 1.5	Persentase Pegawai Tahun 2020	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum dan Pemilihan merupakan fondasi awal bagi demokrasi dalam memilih presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD dan DPRD dalam perspektif ketatanegaraan. Dalam Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Untuk menjalankan pemilihan tersebut KPU bersifat tetap, mandiri dan independen, yang tentunya para anggota KPU yang menyelenggarakan Pemilu dan pemilihan harus tunduk dan patuh pada prinsip dan aturan yang menjadi pedoman pemilu dan pemilihan.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat pada dimensi kebebasan sipil, dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat, bahkan dengan keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi langsung diutarakan pada permasalahan sosial, politik dan ekonomi. Penyampaian aspirasi, kritikan terhadap kebijakan dan bahkan sampai poling pendapat dipandang lebih efektif dan efisien penyelesaian melalui media sosial, sehingga kebebasan berpendapat dan berekspresi semakin maju.

Selain kebebasan sipil, perkembangan demokrasi pasca Reformasi tahun 1999, pada dimensi aparaturnya penegak hukum, supremasi hukum mulai memperlihatkan perbaikan. Tuntutan hak dan ketidak cermatan dalam Pemilu dan Pemilihan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, dimana putusan yang telah ditetapkan bersifat final mengikat, tidak ada ada putusan lain atau pengadilan lain dapat membatalkan atau merubahnya.

Sebagai negara yang besar Indonesia mampu menjalankan negara yang demokratis dengan pergantian penyelenggara negara melalui Pemilihan Umum. pilihan utama Pemilu merupakan cara konstitusi, aman dan tertib tertentu akan memberikan kebebasan dan hak yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara.

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip

yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam Pemilihan Umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Secara umum bahwa setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah aturan yang ada senantiasa berubah dipengaruhi oleh Undang-undang tentang kepemiluan, sehingga hal tersebut dapat mengakomodir hal - hal yang berhubungan dengan dinamisnya perkembangan demokrasi secara nasional maupun lokal dan perbaikan sistem kepemiluan. Dipihak lain, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan Umum memberi warna tersendiri terhadap penguatan kelembagaan demokrasi baik dari dimensi infrastruktur politik maupun suprastruktur politik.

Kedewasaan berpolitik membawa searah dengan kemajuan demokratisasi sebagai ciri masyarakat yang beradab, yang menghormati nilai-nilai kebebasan penghargaan terhadap perbedaan memberikan pendapat, kebebasan memberikan informasi dan menjamin hak hak konstitusi warga negara.

Pada ruang lain, salah satu tantangan dalam pemilu adalah maraknya praktek politik uang (*money politic*) yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan Pemilihan Umum. Bahwa politik uang adalah salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi, politik uang ini merupakan mata rantai dari terbentuknya kartel politik. Demokrasi perwakilan yang mengandalkan votes (suara) dengan mudah diubah menjadi sebuah komoditas, yang akan dijual pada saat sudah diperoleh dan dibeli saat belum diperoleh. Dibeli waktu Pemilihan Umum dengan segala teknik dan dijual pula dengan segala teknik.

Oleh sebab itu, melalui visi misi dan program KPU sampai tingkat bawah berupaya mewujudkan pemiliu yang berintegritas, yang bebas dari politik uang, kekerasan dan ketidakadilan melalui laporan kinerja ini KPU Provinsi Gorontalo bersama KPU kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo mempertanggung jawabkan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2020.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum anggota DPR RI, DPD, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. KPU Provinsi Gorontalo bersifat tetap, mandiri dan hierarki dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang serta berperan sebagai koordinator dan fasilitator bagi KPU Kabupaten/Kota di wilayah Gorontalo.

2. Tugas dan fungsi

Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur Tugas KPU Provinsi dalam Pemilihan Umum disebutkan bahwa tugas sebagaimana pasal 15 sebagai berikut:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;

- j. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi KPU Provinsi Gorontalo

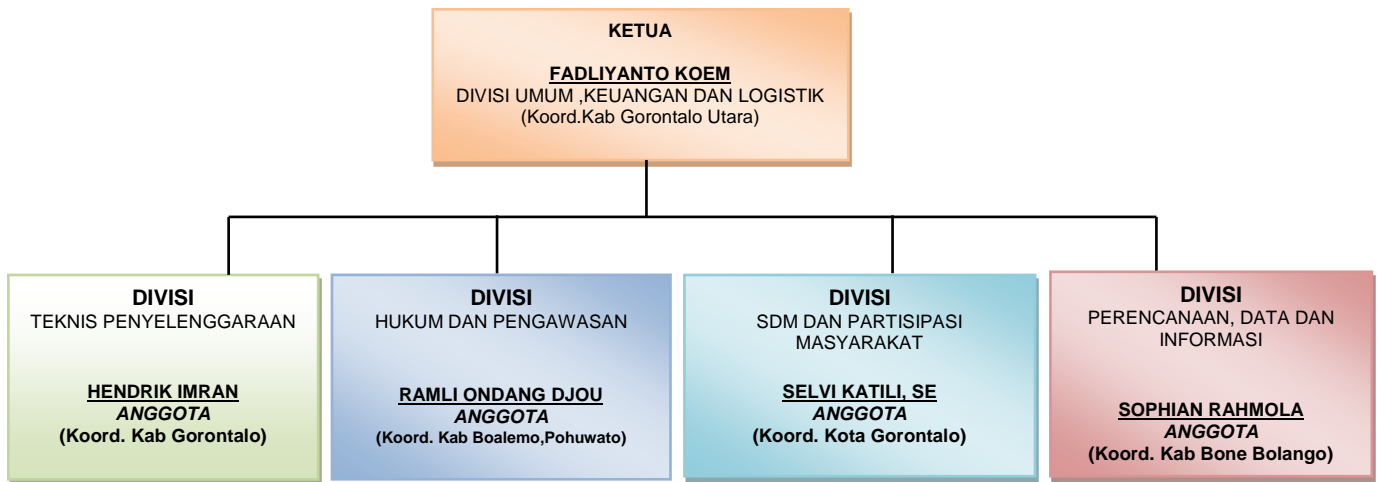
Dalam sebuah lembaga organisasi yang bersifat tetap, memiliki struktur yang bertujuan untuk membagi tugas dan fungsi yang membagi habis tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing masing individu dalam struktur, yang bersifat koordinasi, vertikal dan horisontal.

Pada tataran pengambilan keputusan atau kebijakan Ketua dan Anggota mempunyai hak suara yang sama atau diputuskan bersama sama (kolektif kolegial). Untuk organisasi KPU Provinsi Gorontalo telah dibentuk Divisi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo



Nomor: 131/Kpts/KPU-prov/027/IX/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 146/Kpts/KPU-Prov/027/I/2018 Tentang Pembagian Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPU Provinsi Gorontalo. Bahwa surat keputusan tersebut disesuaikan dengan peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. adapun struktur divisi KPU Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

GRAFIK 1.1. STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO MASA JABATAN 2018-2022



Untuk menjabarkan tugas divisi dalam struktur organisasi Anggota KPU Provinsi Gorontalo 2018-2022, telah disusun tugas masing-masing Divisi sebagai berikut:

1. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik

Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Administrasi perkantoran;
- b. Kearsipan;
- c. Protokol dan persidangan;
- d. Pengelolaan dan pelaporan Badan Milik Negara;
- e. Kerumah tanggaan kantor;
- f. Keamanan;
- g. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaporan keuangan;
- h. Logistik;
- i. Pengadaan barang dan jasa.

2. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Divisi Teknis mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
- b. Pencalonan;

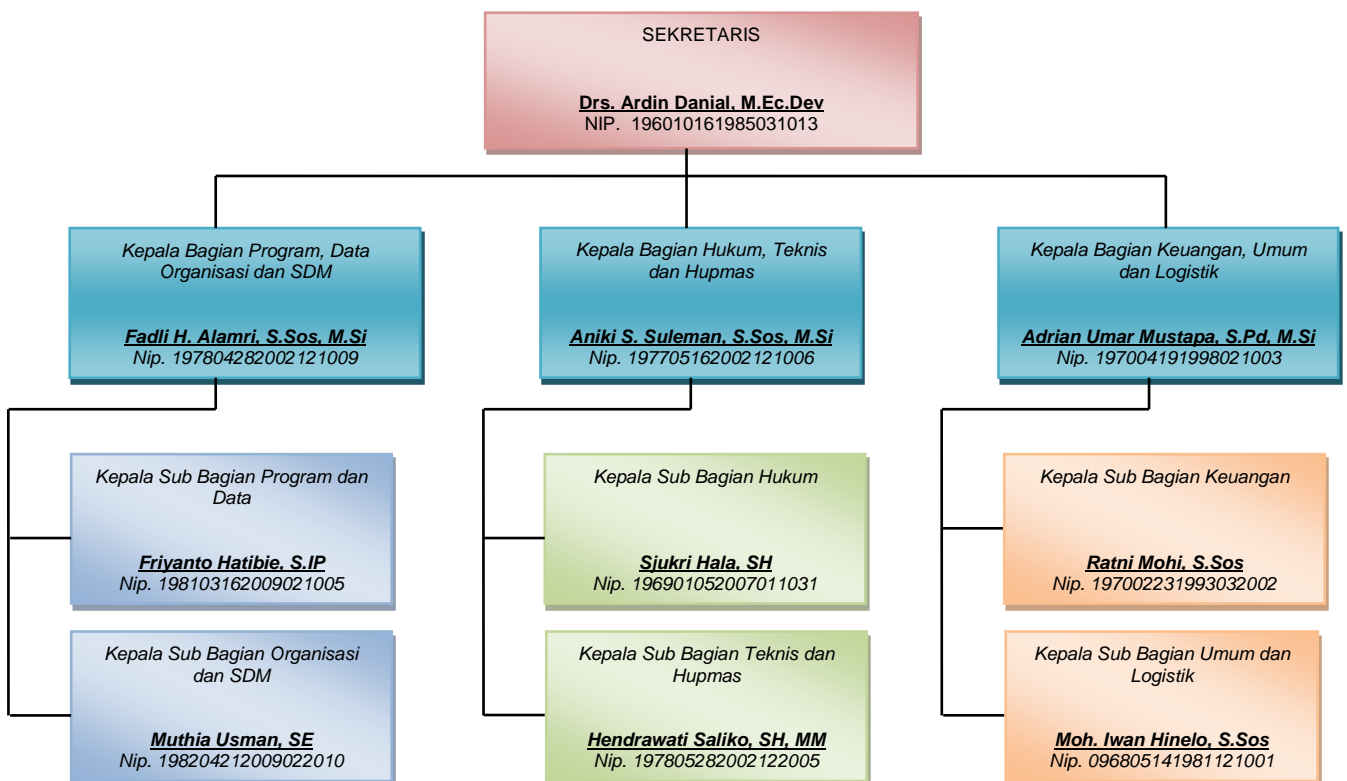
- c. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
 - d. Penggantian antar waktu anggota DPRD dan DPD.
3. Divisi Hukum dan Pengawasan
- Divisi hukum mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembuatan rancangan Keputusan;
 - b. Verifikasi Partai Politik;
 - c. Verifikasi Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Pelaporan Dana Kampanye;
 - e. Telaah Hukum;
 - f. Advokasi Hukum;
 - g. Sengketa Pemilu;
 - h. Dokumentasi Hukum;
 - i. Pengawasan/Pengendalian Internal.
4. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
- Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Rekrutmen anggota KPU dan badan Adhoc;
 - b. Diklat dan pengembangan SDM;
 - c. Pengembangan Budaya kerja organisasi;
 - d. Penegakan disiplin organisasi;
 - e. Kampanye;
 - f. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
 - g. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - h. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
5. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
- Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas sebagai beriku:

- a. Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Pemutakhiran Data Pemilih;
- c. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan;
- d. Pengelolaan jaringan IT;
- e. Scan hasil Pemilu;
- f. Pelaporan dan Evaluasi.

2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo

Adapun struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

**GRAFIK 1.2. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020**



3. Sumber Daya Manusia

Penyelenggara Pemilu selang tahun 2020 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengalami penurunan kuantitas (jumlah) dipengaruhi oleh pemetaan dan analisis jabatan masing masing Aparatur Sipil Negara yang bekerja di masing-

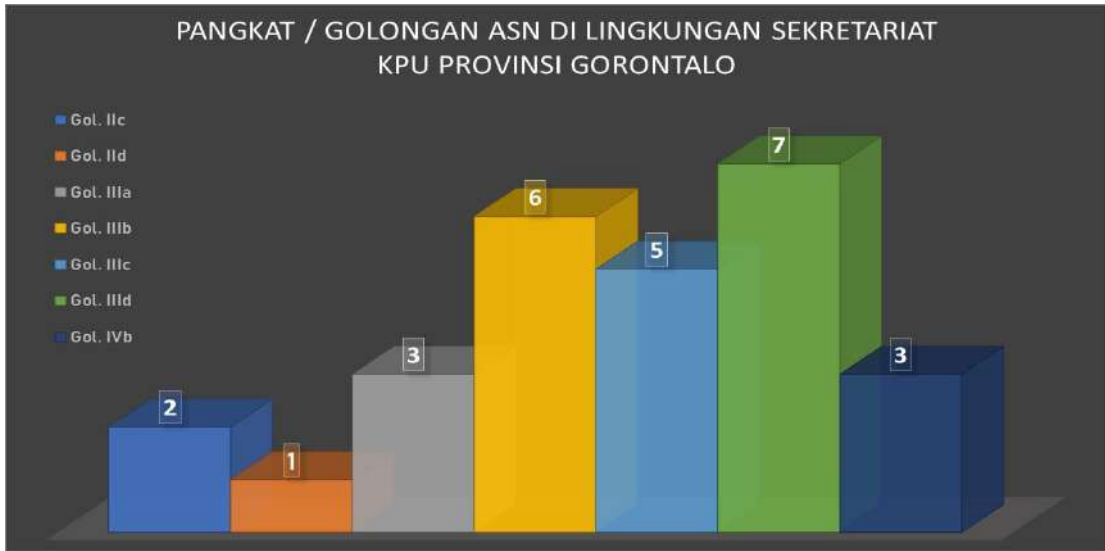
masing satuan kerja, sesuai dengan surat edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 05 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal pemetaan pegawai pada sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. surat tersebut menyamaratakan Aparatur sipil negara setiap Sekretariat KPU Provinsi maksimal berjumlah 35 orang dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebanyak 17 orang, sehingga masing masing ASN diharapkan mampu atau serba bisa dalam melaksanakan tugas kepiluan dan kedinasan. Kendala yang di hadapi KPU Provinsi Gorontalo dalam sumberdaya manusia masi kurang atau tidak sesuai dengan surat edaran KPU RI, diakibatkan ada beberapa pegawai mengalami penarikan oleh instansi induk daerah, pensiun dan ada juga yang mengisi jabatan yang kurang di KPU Kabupaten/Kota sehingga jumlah pegawai KPU Provinsi Gorontalo berjumlah 28 orang yang seharusnya 35 orang untuk setiap Provinsi seluruh Indonesia

Disamping itu, khususnya pada jajaran kesekretariatan mengisi beberapa jabatan struktural yang dimutasikan atau mengalami pergeseran dari instansi induk (Pemerintah Daerah) dengan mempertimbangkan kemampuan aparatur negara yang disesuaikan dengan Peraturan yang ada.

Adapun komposisi SDM di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:



Grafik 1.3. Data Golongan dan Kepangakatan KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020



Komposisi aparatur sipil negara yang bekerja di Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo memiliki beragam disiplin ilmu dan jenjang pendidikan seperti grafik dibawah ini:

Grafik 1.4 Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2020

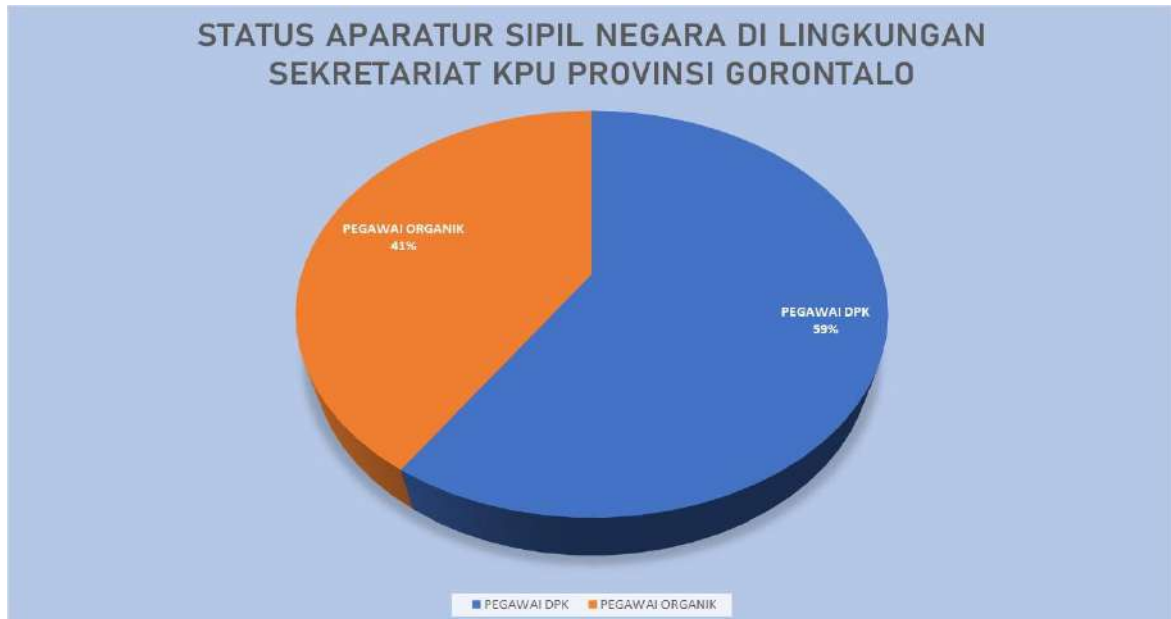


te

Gorontalo
Sekretaris

Jenderal KPU RI (pegawai organik) sebanyak 12 orang dan aparatur sipil negara yang berasal dari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang diberi penugasan di Instansi KPU sebanyak 16 orang dengan total pegawai berjumlah 28 orang. Adapun persentase sebagaimana grafik dibawah ini

Grafik 1.5. Persentase Pegawai Tahun 2020



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 - 2024



KPU Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari satuan kerja perangkat pusat yang ada di daerah membuat rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Strategi yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Renstra KPU Provinsi Gorontalo memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 2020 - 2024.

Adapun visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Visi

Adapun visi KPU Provinsi Gorontalo 2020-2024 adalah **Menjadi Penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil**. Penjabaran visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Provinsi Gorontalo untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional nawa cita, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.

2. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2020 – 2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabilitas, serta aksesibel

- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme Penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara pemilu
- c. Menjalankan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

3. Tujuan KPU Provinsi Gorontalo

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU Provinsi Gorontalo yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Gorontalo;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel; dan
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya Provinsi Gorontalo.

4. Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo

Sebagai wujud dari bentuk akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, maka Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo sesuai Indikator Kinerja KPU RI sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 74.a/HK.03-Kpts/Prov/VI/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. Adapun indikator kinerja utama sebagaimana berikut:

- 1) Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
- 2) Persentase partisipasi pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan
- 3) Persentase partisipasi pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan
- 4) Persentase partisipasi pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan
- 5) Persentase pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
- 6) Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik
- 7) Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan
- 8) Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU
- 9) Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo
- 10) Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo

5. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai kurun waktu 2020-2024 adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan Sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP).



Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang demokratis:
 - a. Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu / Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu / Pemilihan;
 - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu / Pemilihan;
 - e. Persentase pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
2. Meningkatnya Pemilu / Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Aman, Damai, Jujur dan Adil dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase KPU Provinsi Gorontalo, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan, dengan indikator:
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo;
 - b. Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo.

B.RENCANA KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020

Setiap tahun anggaran telah disusun dalam rencana kerja tahunan KPU, KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan yang tersistematik dan sinkron dengan RKT KPU RI Tahun 2020. Oleh karena itu dalam perencanaan kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020 mempunyai Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1. Rencana Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Demokratis	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
2	Meningkatnya Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik
		Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik

C. PERJANJIAN KINERJA KPU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020

Dalam rangka mengaktualisasikan rencana kerja tahunan telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja KPU Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Demokratis	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%
2	Meningkatnya Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Gorontalo	86%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik
		Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik

PROGRAM

ANGGARAN

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya | Rp. 6.187.815.000,- |
| 2. | Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | Rp. 590.608.000,- |

Bahwa dalam perjanjian kinerja KPU Provinsi Gorontalo terdapat perubahan revisi penambahan anggaran sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3. Revisi Pagu Anggaran KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN DIPA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	SELISIH (+/-)	KETERANGAN
1	DIPA AWAL	6.778.423.000	-	-	Pagu Awal DIPA APBN T.A 2020
2	DIPA REVISI 1	6.778.423.000	5.923.486.000	854.937.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
3	DIPA REVISI 2	5.923.486.000	5.946.803.000	23.317.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
4	DIPA REVISI 3	5.946.803.000	6.450.350.000	503.547.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
5	DIPA REVISI 4	6.450.350.000	6.828.935.000	378.585.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
6	DIPA REVISI 5	6.828.935.000	7.197.879.000	368.944.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
7	DIPA REVISI 6	7.197.879.000	6.863.304.000	334.575.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA



Pada tahun anggaran 2020 KPU Provinsi Gorontalo telah melaksanakan program dan kegiatan serta capaian kinerja dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah yang terdapat pada tiga (3) kabupaten dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta kegiatan rutin dalam menunjang tugas dan fungsi KPU Provinsi Gorontalo. Secara garis besar sasaran utama yang harus dicapai dapat digambarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). KPU Provinsi Gorontalo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan merujuk kepada Sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024.

Adapun yang menjadi capaian indikator kinerja utama (IKU) KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Indikator Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100%
2	Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	77,50 %	84,60%	109%
3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	75 %	87,13%	116%
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	75 %	-	-
5	Persentase Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	84,60%	141%
6	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105%
7	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/	3%	0,14%	0.04 %

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan			
8	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%	100%	116%
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	B	B	B
10	Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Baik	Baik

Dalam mengukur target keberhasilan indikator kinerja, KPU Provinsi Gorontalo berpedoman pada target rata rata nasional yang akan mengukur pencapaian kinerja masing-masing satuan kerja dibawah naungan KPU RI. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai satu bagian manajemen yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri serta hirarki, yang menjadi program dan kegiatan KPU RI menjadi bagian yang tak terpisahkan dari KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain itu untuk mengukur pencapaian kinerja dianalisis melalui perbandingan target capaian tahun sebelumnya dan kinerja pada tahun berjalan serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan ataupun penurunan kinerja dan alternative solusi yang dilakukan dalam hal permasalahan yang dihadapi. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020 yang telah dicapai sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.2. Indikator Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
SASARAN 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Demokratis				
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
2	Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	77,50%	84,60%	109%
3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	87,13%	116%
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	-	-
5	Persentase Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	84,60%	144%
SASARAN 2. Meningkatnya Pemilu/ Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Aman, Damai, Jujur dan Adil				

6	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105%
7	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%	0,14%	0.04 %
8	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%	100%	116%
SASARAN 3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan				
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	B	B	B
10	Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Baik	Baik

B.EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Gorontalo pada Tahun 2020 dalam sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

SASARAN	1
----------------	----------

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo Yang Demokratis

Untuk mencapai target pada sasaran meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang demokratis dapat dilihat melalui kinerja



KPU Kabupaten yang melakukan Pilkada Tahun 2020. Pada tahun 2020 di Provinsi Gorontalo terdapat tiga Kabupaten yang melakukan Pilkada yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango. Pada proses tahapan di tiga Kabupaten yang melakukan Pilkada KPU Provinsi Gorontalo melakukan

Monitoring dan Evaluasi setiap tahapan yang ada apa sudah sesuai dengan PKPU dan juknis dari KPU RI adapun indikator yang mengukur sasaran strategis meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang demokratis Antara lain sebagaimana dibawah ini:

1. Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pilkada Tahun 2020 telah diatur pada peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adapun tahapan yang dilakukan antara lain:

- a. Perencanaan program dan anggaran
- b. Penyusunan program dan anggaran
- c. Sosialisasi kepada masyarakat
- d. Pembentukan dan masa kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS
- e. Pembentukan panitia pengawas Pemilihan Kecamatan
- f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, dan lembaga survei dan perhitungan cepat hasil pemilihan
- g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan
- h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
- i. Pengumuman pendaftaran pasangan calon
- j. Pendaftaran pasangan calon
- k. Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon
- l. Penetapan pasangan calon

- m. Pelaksanaan kampanye
- n. Pelaksanaan pemungutan suara
- o. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- p. Penetapan calon terpilih
- q. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan
- r. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih
- s. Evaluasi dan pelaporan tahapan

Adapun kegiatan yang menunjang sasaran strategis meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang demokratis antara lain Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan, Layanan pengadaan logistik, Pengelolaan hibah Pemilihan.

Adapun daftar Pemilih pada Pilkada Tahun 2020 yang berada di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berjumlah 502.227 orang dengan jumlah pemilih laki-laki 250.411 dan perempuan 251.816 yang tersebar di 1.468 TPS

Proses Pemilihan Pilkada Tahun 2020 dari awal tahapan sampai dengan hasil di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang kesemua tahapan tersebut dilakukan Supervisi/monitoring dan bimbingan teknis sehingga penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang ada di Provinsi Gorontalo terlaksana sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahapan Pilkada tepat waktu dapat dilihat dari indikator kegiatan yang di lakukan KPU Provinsi Gorontalo sesuai dengan tahapan yang berjalan dan dilaksanakan dengan waktu yang ditentukan sehingga mencapai realisasi 100 persen sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.3. Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku pada tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2018 (%)	Realisasi 2019 (%)	2020		Capaian Realisasi (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	100	100	100	100

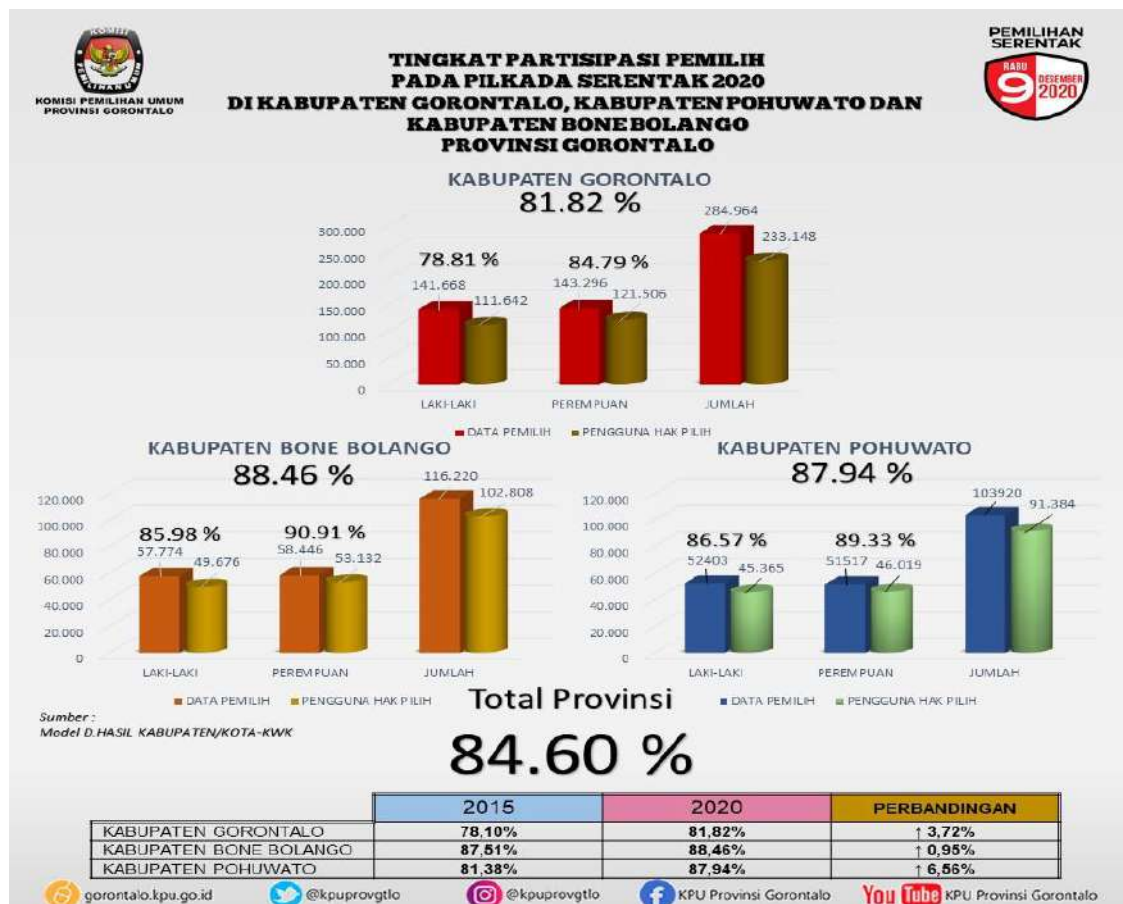
Indikator ini sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berjalan sesuai dengan target capaian, karena setiap tahapan pemilu harus sesuai dengan jadwal tahapan yang tidak boleh dimajukan atau mengalami penundaan tanpa ada kendala dan permasalahan ataupun rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu, untuk menganalisa keberhasilan indikator ini, ada 5 (lima) tahapan krusial yang menjadi indikator ketepatan jadwal tahapan, yaitu tahapan pemutakhiran, tahapan pencalonan, tahapan kampanye, pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara, setiap tahapan krusial ini diberi bobot 20 persen. kesimpulan dari evaluasi dari indikator ini kelima tahapan berjalan sesuai jadwal tahapan sehingga tidak ada temuan dan laporan terkait keterlambatan jadwal tahapan.

2. Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan

Meningkatnya persentase partisipasi pemilih dalam pemilu / pemilihan dalam wilayah Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dari target nasional 77,50 persen dalam rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Gorontalo tingkat partisipasi pemilihnya 81.82 Persen, Kabupaten Pohuwato 87.94 persen dan Kabupaten Bone Bolango tingkat partisipasi pemilihnya mencapai 88.46 Persen. sedangkan untuk Partisipasi Pemilih untuk Provinsi Gorontalo mencapai 84,60 persen yang diakumulasi dari Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango.

Tingkat partisipasi Pemilih pada Pilkada Tahun 2020 dari total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 502.227 orang dan yang menggunakan hak pilihnya 427.340 orang. Pencapaian ini tentunya dilakukan dengan kegiatan diantaranya dokumen Pemutakhiran data Pemilih

Tabel 3.4 Partisipasi Pemilih Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango



Tabel 3.5. Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu / Pemilihan pada tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2018 (%)	Realisasi 2019 (%)	2020		Capaian Realisasi (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	80.01	81.34	82,34	86,71	77,50	84,60	109

Partisipasi pemilih di Provinsi Gorontalo dipandang berhasil karena melebihi target nasional, hal ini dilihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya

3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu / Pemilihan

Pemilih perempuan menjadi perhatian tersendiri bagi KPU Provinsi Gorontalo, yang dituangkan dalam rencana strategis. dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah, partisipasi pemilih perempuan ditargetkan 75 % di tahun 2020. Partisipasi pemilih perempuan Provinsi Gorontalo pada Pilkada Tahun 2020 yang terdapat pada Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango melebihi target nasional yang ditentukan oleh KPU RI dengan realisasi sebesar 87,13 % realisasi tersebut diambil dari total jumlah pemilih perempuan 251.816 orang dan yang menggunakan hak pilihnya 218.242 orang. Sedangkan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat partisipasi Pemilih perempuan mencapai 87.56 %. Sehingga, dilihat dan dibandingkan pada tahun 2019 partisipasi pemilih di Provinsi Gorontalo memiliki penurunan dikarenakan pengukuran partisipasi pemilih tahun 2020 hanya pada tiga kabupaten yang melakukan pemilihan sedangkan pada tahun 2019 terdiri dari enam Kabupaten/Kota yang mengikuti Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam indikator ini ditunjang oleh program dan kegiatan diantaranya Publikasi informasi Pemilu, Supervisi dan monitoring Pemilu dan pemilihan

Adapun perbandingan capaian realisasi partisipasi pemilih perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu / Pemilihan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.6. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan pada tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2018 (%)	Realisasi 2019 (%)	2020		Capaian Realisasi (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	81,37	82,81	84,16	87,58	75	87,13	116

Partisipasi pemilih perempuan di Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh regulasi yang memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan, kepengurusan partai politik dan bahkan penyelenggaraan Pemilihan Umum. selain itu kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten yang melakukan Pilkada berupa pembentukan dan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pendidikan pemilih pemilu, yang output kegiatannya menguatkan peran partisipasi pemilih perempuan. Adapun mekanisme pengukuran indikator partisipasi pemilih perempuan yaitu, pengguna hak pilih perempuan dibagi pemilih perempuan dalam DPT.

4. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo Dalam Pemilu / Pemilihan

Pemilih berkebutuhan khusus yang dijamin haknya sebagai warga negara yang mengalami atau memiliki keterbatasan fisik dan mental secara bawaan maupun akibat kecelakaan. Pemilih disabilitas Provinsi Gorontalo yang yang berpartisipasi dalam Pilkada Tahun 2020 yang terdapat pada Kabupaten Gorontalo 857 orang, Kabupaten Pohuwato 848 orang dan Kabupaten Bone Bolango 1.086 yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dari hasil rekap tiga Kabupaten yang melaksanakan Pilkada jumlah pemilih disabilitas berjumlah 2.791 orang dan yang menggunakan hak pilihnya tidak dapat ditentukan dikarenakan dalam formulir pemungutan dan perhitungan suara dan rekapitulasi tidak di muat sehingga mengevaluasi pemilih disabilitas tidak dapat diukur. Hal ini berdasarkan surat edaran KPU RI nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019.

Adapun pemilih disabilitas pada Provinsi Gorontalo pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdapat pada tiga Kabupaten dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.7 Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo Dalam Pilkada tahun 2020

NO	KABUPATEN	DISABILITAS FISIK			DISABILITAS INTELEKTUAL			DISABILITAS MENTAL			DISABILITAS SENSORIK			TOTAL DISABILITAS		
		LK	PR	TTL	LK	PR	TTL	LK	PR	TTL	LK	PR	TTL	LK	PR	TTL
1	Kab. Gorontalo	198	259	457	57	39	96	68	71	139	69	96	165	392	465	857
2	Kab. Bone Bolango	225	252	477	33	28	61	129	107	236	137	175	312	524	562	1.086
3	Kab. Pohuwato	183	257	440	12	18	30	75	45	120	120	138	258	390	458	848
Total		606	768	1.374	102	85	187	272	223	495	326	409	735	1.306	1.485	2.791

Adapun perbandingan pengukuran kinerja terhadap capaian persentase partisipasi pemilih disabilitas KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.8 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu / Pemilihan pada tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2018 (%)	Realisasi 2019 (%)	2020		Capaian Realisasi (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Partisipasi Pemilih disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	80.28	32,69	77,15	62.17	75	-	-

Dalam tabel diatas dapat dilihat realisasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih tidak dapat tercapai dikarenakan surat edaran KPU RI nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 pada target indikator kinerja KPU Provinsi Gorontalo didukung oleh program dan kegiatan antara lain sosialisasi pilkada serentak 2020, pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana yang berkaitan dengan kepemiluan kepada masyarakat. Dalam hal pemberian informasi pemilih disabilitas merupakan salah satu segmen yang harus mendapat perhatian khusus, agar mereka dapat memahami dan mampu berpartisipasi dalam pemilu / pemilihan. Disamping itu juga KPU Provinsi Gorontalo

melakukan penataan rumah pintar pemilu yang di dalamnya terdapat informasi pemilu bagi siapa saja yang membutuhkan informasi.

5. Persentase Pemilih KPU Provinsi Gorontalo Yang Terdaftar Dalam DPT Yang Menggunakan Hak Pilihnya

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan bagian dari Pemilu/Pemilihan. Tahapan



pemutakhiran data pemilih ini adalah salah satu tahapan penting dalam Pemilu/Pemilihan yang waktu pelaksanaannya lebih lama dibanding tahapan lainnya. Karena tahapan pemutakhiran ini berkaitan dengan data, maka akurasi data menjadi hal yang penting. Akurasi data pemilih ini akan berpengaruh terhadap jumlah logistik serta kelengkapannya dan juga akan berpengaruh terhadap rasio tingkat partisipasi yang turut menentukan kualitas pelaksanaan demokrasi. Dalam menjamin hak memilih setiap warga negara, Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya di singkat DPT adalah Daftar Pemilih yang merupakan hasil penyempurnaan, perbaikan atau tanggapan masyarakat atas daftar pemilih yang telah melalui proses yang panjang guna untuk memperoleh Daftar Pemilih yang bersih, akurat dan akuntabel. adapun jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Tahun 2020 yang terdapat pada Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berjumlah 502.227 orang sesuai dengan tabel ini

1	KABUPATEN KOTA	KEC	DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH		
					LK	PR	TOTAL
1	KAB. GORONTALO	19	205	811	141.126	142.722	283.848
2	KAB. BONE BOLANGO	18	165	351	57.453	58.140	115.593
3	KAB. POHUWATO	13	104	306	51.832	50.954	102.786
TOTAL		50	474	1.468	250.411	251.816	502.227

Adapun indikator kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo pada KPU Kabupaten yang melakukan Pilkada tahun 2020 diantaranya melakukan penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM pada KPU Kabupaten dalam menaikan partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2020. dengan kerja keras KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten yang melakukan Pilkada Partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya untuk Provinsi Gorontalo melebihi target nasional yang dilihat dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 502.227 orang dan yang menggunakan hak pilihnya 427.340 orang atau sebesar 84.60 persen untuk mengukur partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya jumlah pemilih dibagi pemilih yang menggunakan hak pilih.

Adapun capaian kinerja KPU Provinsi Gorontalo terhadap target nasional dari tahun ketahun sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.9. Persentase Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak dalam daftar pemilih tetap Pada Pemilu / Pemilihan pada tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	2018		Capaian Realisasi (%)
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pemilih KPU Provinsi Gorontalo Yang Terdaftar Dalam DPT Yang Menggunakan Hak Pilihnya	-	-	82.34	86.45	60	84.60	141

Persentase ini sudah melewati target rata-rata nasional sebesar 60 persen, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya bahwa pemilih yang telah terdaftar sudah mengetahui pasti, di TPS mana dia terdaftar sehingga pemilih tersebut memilih di TPS yang berada di desa/kelurahannya.

KPU Provinsi Gorontalo senantiasa bekerja keras agar seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dimana setiap tahunnya KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan secara rutin tanpa harus menunggu tahapan pemutakhiran pada setiap pemilu/pemilihan.

SASARAN**2**

**Meningkatnya Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo Yang Aman,
Damai, Jujur Dan Adil**

Sasaran Strategis meningkatkan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil merupakan unsur terpenting dari pelaksanaan Pemilu/Pemilihan, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai aturan perundang-undangan maka banyak tuntutan dari peserta Pemilu yang akan mengarah pada konflik, maka dengan sendirinya pelaksanaan Pemilu tidak akan berjalan aman dan lancar. Oleh sebab itu, faktor kejujuran dan keadilan bagi penyelenggaraan pemilu merupakan faktor utama sebuah keberhasilan pelaksanaan pemilu/pemilihan. Adapun indikator kinerja yang mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini adalah

1. Persentase KPU Provinsi Gorontalo, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik

Setiap penyelenggaraan pemilu/pemilihan tidak menginginkan konflik baik vertikal maupun horisontal, namun ada kalanya disetiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan terjadi gesekan yang menyebabkan terjadinya konflik yang dikarenakan ketidakpuasan atau tidak menerima hasil kekalahan bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Untuk meminimalisir konflik yang akan terjadi maka ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo dan jajaran sampai ke tingkat PPS pada tahun 2020, melakukan beberapa kegiatan antara lain: dengan

memperkuat regulasi berupa penyusunan rancangan pedoman/juknis penyelenggaraan tahapan pemilu dan rancangan peraturan perundang - undangan.

KPU Kabupaten juga bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Tokoh Agama, Mahasiswa, Jurnalis dan Pemerintah Daerah lainnya. Kerjasama tersebut tentang pengamanan penegakan hukum, dan sosialisasi dalam menjaga keamanan dan kestabilan daerah sehingga pemilihan berjalan dengan damai, jujur dan adil.

Kerjasama dengan pihak keamanan salah satunya yaitu dengan bertujuan untuk mengawal seluruh kegiatan Pilkada Tahun 2020 yang ada di wilayah Kabupaten, termasuk pengiriman logistik, pengawalan dan pengamanan fisik surat suara sampai dengan tahapan akhir penghitungan suara.

Situasi aman pada indikator Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak tanpa konflik dibatasi pengukurannya pada kondisi kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap asset Negara akibat dari kerusuhan massa. Pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berjalan dengan damai tertib tanpa ada konflik sehingga pemilihan tahun 2020 dianggap berhasil dan sukses.

Adapun pengukuran capaian kinerja KPU Provinsi Gorontalo terhadap target nasional dari tahun ketahun dilihat dari tingkat permasalahan atau konflik kabupaten yang melakukan pemilihan sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.10. Persentase KPU Provinsi Gorontalo, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik pada tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	2020		Capaian
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, dan KPU Kabupaten / Kota yang	100	95	95	100	95	100	105

melaksanakan Pemilu /
Pemilihan tanpa konflik

2. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu / Pemilihan

Penurunan persentase dari pelaksanaan Pemilu/Pemilihan ke pemilihan berikutnya semakin turun dalam persentase penyelenggara pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran, hal ini dipengaruhi meningkatnya pengawasan melalui pendekatan persuasif dan penindakan langsung kepada penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran. Pencegahan sejak dini terhadap penyelenggara yang melakukan pelanggaran merupakan salah satu strategi yang diupayakan oleh KPU Provinsi Gorontalo dalam rangka memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemilu/pemilihan secara jujur, adil dan demokratis pada setiap tahapan.

Penyelenggara Pemilu mulai dari KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS apabila melakukan pelanggaran akan diberikan putusan pada sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada Pilkada tahun 2020 Kabupaten Gorontalo mempunyai permasalahan terkait calon petahana yang diduga melanggar pasal 71 undang - undang dasar tahun 2016 yang menjadi rekomendasi bawaslu sehingga melanggar kode etik dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu memberikan sanksi tegas berupa teguran keras kepada 5 komisioner Kabupaten Gorontalo dan menggantikan Rasyid Sayiu dari jabatannya sebagai ketua KPU Kabupaten Gorontalo dan untuk Kabupaten Bone Bolango

PPS diganti karena mengundurkan diri alasan pekerjaan, KPPS diganti karena dianggap tidak netral dan mendukung salah satu paslon dengan memposting di media online dan untuk Kabupaten Pohuwato penyelenggara pemilu tidak memiliki permasalahan dalam pemilu

Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dari tahun ketahun sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.11. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu / Pemilihan pada tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	2020		Capaian Realisasi (%)
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu / Pemilihan	-	0.01	0.48	0,13	3	0.14	0.04

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran hanya 3 orang atau 0.08 persen dari jumlah penyelenggara pemilu 35 orang. Dan untuk tahun 2020 penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran hanya 5 orang atau 0.14 persen dari 35 orang penyelenggara. Sehingga penyelenggara pemilu yang berada di KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota mengalami pengurangan dari tahun ketahun sehingga realisasinya menjadi 0.4 persen lebih kurang dari target 3 persen pada indikator ini pengukurannya dilihat dari lebih kecil yang melakukan pelanggaran maka lebih baik realisasinya. Kegiatan yang berkenan dengan indikator ini berupa penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana kegiatan memberikan penguatan

kelembagaan organisasi terhadap SDM anggota KPU maupun sekretariat KPU yang memfasilitas tugas dan kewenangan penyelenggaraan pemilu.

3. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Setiap pemilihan ada rasa ketidakpuasan oleh pasangan calon maupun partai politik pendukung yang kalah dalam pemilihan, salah satu solusi yang diberikan oleh konstitusi adalah penyelesaian sengketa melalui



Mahkamah Konstitusi yang dapat digugat / diajukan oleh pasangan calon atau pendukung karena keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Gorontalo dan KPU kabupaten Gorontalo , KPU Kabupaten Pohuwato serta KPU Kabupaten Bone Bolango yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah . Dalam melaksanakan target indikator kinerja KPU Provinsi Gorontalo didukung oleh program dan kegiatan layanan administrasi kepegiluan. Dimana KPU Provinsi Gorontalo hanya melakukan monitoring dan evaluasi disetiap tahapan yang ada di KPU kabupaten Gorontalo, KPU Kabupaten Pohuwato serta KPU Kabupaten Bone Bolango

Untuk tahun 2020 pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berada pada Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango memiliki sengketa masing – masing. Kabupaten Gorontalo mempunyai permasalahan terkait calon petahana yang diduga melanggar pasal 71 undang - undang dasar tahun 2016 yang menjadi rekomendasi bawaslu sehingga melanggar kode etik dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu memberikan sanksi tegas berupa teguran keras kepada 5 komisioner Kabupaten Gorontalo dan

menggantikan Rasyid Sayiu dari jabatannya sebagai ketua KPU Kabupaten Gorontalo dan untuk Kabupaten Bone Bolango memiliki dua sengketa antara lain sengketa PHP pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020 atas nama dr. Rusli Monoarfa – Umar Ibrahim, S.AP pokok permohonan bawah pemohon mengendalikan pihak terkait menggunakan struktur pemerintah (TSM) dengan tindak lanjut KPU Kabupaten Bone Bolango menunjuk penasehat hukum atas nama yakop Mahmud dan partner mewakili KPU Kabupaten Bone Bolango menghadiri sidang sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara nomor 52/PHP.BUP.XIX /2021, sengketa antara lain sengketa PHP pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020 atas nama Hi Kilat Wartabone – Syamsir Djafar Kiayi, ST, M.Si pokok permohonan bawah pemohon mengendalikan pihak terkait menggunakan struktur pemerintah (TSM) dengan tindak lanjut KPU Kabupaten Bone Bolango menunjuk penasehat hukum atas nama Yakop Mahmud dan partner mewakili KPU Kabupaten Bone Bolango menghadiri sidang sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara nomor 63/PHP.BUP.XIX /2021, kedua sengketa untuk Kabupaten Bone Bolango masi menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi

Kabupaten Pohuwato memiliki dua sengketa antara lain pencalonan perorangan atas nama Salahudin Pakaya SH dan Vicky Prasetyo dengan pokok permasalahan membatalkan surat keputusan nomor 149/PL.02-KPT/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato tahun 2020, dengan tindak lanjut KPU Kabupaten Pohuwato menunjuk penasehat hukum atas nama yakop Mahmud dan partner mewakili KPU Kabupaten Pohuwato menghadiri sidang sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Pohuwato dengan register perkara nomor 002/PS/BWSLPHW.29.06/X/2021 dan untuk hasil putusan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati nomor register 002/PS/BWSLPHW.29.06/X/2021 tanggal 13 Oktober 2020, memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Sengketa PHP Pemilihan Buppati dan Wakil Bupati Pohuwato tahun 2020 atas nama Iwan Djafuruddin Adam, SH dan Zunaidi Z Hasan dengan pokok permasalahan bahwa

pemohon mendalilkan pihak terkait menggunakan struktur pemerintah (TSM) dengan tindak lanjut KPU Kabupaten Pohuwato menunjuk penasehat hukum atas nama yakop Mahmud dan partner mewakili KPU Kabupaten Pohuwato menghadiri sidang sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara nomor 27/PHP.BUP-XIX/ 2021 dan untuk hasil menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Untuk lebih jelasnya sebagaimana rincian tabel dibawah ini:

Tabel 3.12. Jumlah Kasus Yang Dimenangkan Oleh KPU Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Se – Provinsi Gorontalo Tahun 2019 – 2020

NO	KAB/KOTA	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		JML KASUS	YANG DIMENANGKAN	JML KASUS	YANG DIMENANGKAN	JML KASUS	YANG DIMENANGKAN	JML KASUS	YANG DIMENANGKAN	JML KASUS	YANG DIMENANGKAN	JML KASUS	YANG DIMENANGKAN
1	Kab. Gorontalo	1	1	1	1							2	2
2	Kab. Boalemo			2	1								
3	Kab. Pohuwato	1		1	1							2	2
4	Kab. Bone Bolango	2		1	1							2	2
5	Kab. Gorontalo Utara												
6	Kota Gorontalo							1	1				
7	Provinsi Gorontalo			5	5	1	1			1	1		
	JUMLAH	4	1	10	9	1	1	1	1	1	1	6	6

Pada tahun 2019 konflik antara penyelenggara Pemilu dengan bakal pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD KPU Provinsi Gorontalo Terdapat 1 (satu) kasus yang digugat oleh pasangan calon dari partai keadilan sejahtera (PKS) pileg DPRD Provinsi dabil 1 kota Gorontalo tentang sengketa hasil perolehan suara yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. kasus pencalonan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dabil kota tersebut ditolak oleh mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 03-08-30/PKS sehingga sengketa hasil perolehan suara dimenangkan oleh KPU Provinsi Gorontalo.

Untuk gugatan tahun 2020 konfil antara penyelenggara pemilu dengan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang berada pada tiga Kabupaten terdapat enam kasus yang dilaporkan ke DKPP dan dimenangkan oleh KPU.

Adapun persentase gugatan yang dimenangkan KPU se-Provinsi Gorontalo sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.13. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	2020		Capaian
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	60	100	100	100	86	100	116

Dari tabel tersebut dapat digambarkan. Untuk KPU Provinsi Gorontalo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 keseluruhan gugatan yang diajukan dapat dimenangkan oleh KPU Provinsi Gorontalo.

SASARAN**3****Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu / Pemilihan**

Salah satu upaya mensukseskan tugas penyelenggaraan Pemilu adalah dengan berupaya memberikan penguatan kapasitas penyelenggara pemilu/ pemilihan senantiasa dilakukan dengan berbagai kegiatan melalui bimbingan teknis, rapat evaluasi maupun penguatan internal penyelenggara baik di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo sampai pada tingkat penyelenggara adhoc. Hal ini dilakukan demi untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan agar pelaksanaan pemilu / pemilihan benar-benar berkualitas dan mendapatkan hasil sesuai target yang diharapkan.

Penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu merupakan faktor utama terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan pemilu, karena yang diberikan penguatan berupa sistem kerja dan SDM yang bekerja dalam penyelenggara pemilu, apabila sistem berjalan dengan baik maka berganti aparatur tetap menjalankan tugas dan kewenangan dalam kelembagaan penyelenggara pemilu

Dalam menunjang tercapainya sasaran strategis KPU Provinsi Gorontalo diatas dilakukan dengan 2 (dua) Indikator kinerja dalam mewujudkan peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu/pemilihan yaitu:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo

Sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan, KPU Provinsi Gorontalo mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja dengan pencapaian yang ditargetkan setiap tahunnya dilaporkan dan dievaluasi oleh instansi di atasnya

secara internal dan secara eksternal oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang.

Dalam rangka menyempurnakan kinerja KPU Provinsi Gorontalo tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang mengoptimalkan indikator nilai akuntabilitas kinerja yaitu dokumen perencanaan anggaran, dokumen kepegawaian, laporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan barang milik negara, layanan perkantoran, layanan sarana dan prasarana internal, Layanan pengadaan pegawai baru.

Kesemuanya kegiatan tersebut sangat mendukung indikator dan sasaran strategis pada meningkatkan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu

Tabel 3.14 Pengukuran Kinerja Terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020		Capaian Realisasi
						Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	-	-	Cc	Baik	Baik	Baik	Baik

Dari tabel diatas diterangkan bahwa untuk laporan kinerja tahun 2019 telah mendapat nilai Baik dikarenakan sudah memperbaiki hasil dari reuiu inspektorat RI sedangkan untuk laporan kinerja tahun 2020 sudah sesuai mekanisme dan petunjuk dari inspektorat KPU RI

2. Reuiu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo

Sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan setiap satuan kerja KPU di wilayah Indonesia dilakukan reuiu atau pemeriksaan keuangan oleh Inspektorat

Setjen KPU Republik Indonesia, guna pertanggungjawaban menuju pemerintahan yang baik dan transparan serta akuntabel. KPU Provinsi Gorontalo dan jajaran penyelenggara pemilu berkomitmen setiap tahun dapat merealisasikan anggaran sebesar minimal 95 persen dalam target nasional dan realisasi fisik sebesar 100 persen dengan target secara nasional opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada tahun 2019 KPU Provinsi Gorontalo untuk realisasi keuangan mendapat 86,64 persen disebabkan anggaran yang berkenaan dengan remunerasi apatur sipil negara sebagian tidak dapat digunakan dan untuk tahun 2020 KPU Provinsi Gorontalo realisasi keuangan mencapai 96 persen melebihi target nasional, adapun perbandingan dari tahun ke tahun laporan keuangan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.15 Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020		Capaian Realisasi
			7	8	9	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah layanan pembinaan perbendaharaan KPU, laporan sistem akuntansi pelaporan keuangan pemilu, layanan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, layanan perkantoran, laporan hasil reviu laporan keuangan, Alat analisis kesuksesan laporan keuangan antara lain: ketepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan, ketepatan

laporan penyusunan laporan keuangan persemester dan teribnya adminstrasi keuangan perbulan.

C. Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Gorontalo

Pada tahun 2020 KPU Provinsi Gorontalo mengelola anggaran APBN yang diberikan dari KPU RI. Adapun anggaran APBN sebesar Rp. **6. 863. 304. 000,-** (Enam milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah) dari anggaran tersebut KPU Provinsi Gorontalo mengembalikan dana sebesar Rp. **271. 044. 944,-** (Dua ratus tujuh puluh satu juta empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)

Realisasi dari anggaran dalam DIPA KPU Provinsi Gorontalo Nomor: SP. DIPA-076.01.2.654556/2020 Tanggal 05 Desember 2019 untuk anggaran APBN murni mencapai 96 % sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.16 Realisasi APBN Murni KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA SATKER	PAGU		REALISASI	SISA PAGU	PERSENTASE (%)	KET
		AWAL	REVISI				
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(5/4 *100)	8
1	KPU PROVINSI GORONTALO	6.778.423.000	6.863.304.000	6.592.259.056	271.044.944	96	APBN MURNI tahun 2020

Pengelolaan anggaran Tahun 2020 sampai dengan tahun anggaran 2020 Alokasi Anggaran yang diberikan oleh KPU RI melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat dilihat sebagaimana tabel perbandingan dibawah ini

**Tabel 3.17 Perbandingan Pagu dan Realisasi APBN Murni dan HIBAH APBD
Tahun Anggaran 2016 - 2020 KPU Provinsi Gorontalo**

NO	TAHUN ANGGARAN	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	%
1	2016	APBN MURNI	Rp 6.403.263.000	Rp 5.995.675.910	93,63
		APBN + HIBAH APBD	Rp. 56.335.708.000	Rp 43.156.085.894	76,61
2	2017	APBN MURNI	Rp 7.098.808.000	Rp 6.822.519.807	96,11
		APBN + HIBAH APBD	Rp 42.573.933.000	Rp 42.297.644.061	99,35
3	2018	APBN MURNI	Rp 17.489.352.000	Rp 16.523.435.210	94,47
4	2019	APBN MURNI	Rp 24.459.262.000	Rp 21.192.876.997	86,65
5	2020	APBN MURNI	Rp 6.863.304.000	Rp 6.592.259.056	96

Upaya pencapaian yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo merupakan bentuk kesungguhan dalam mengaktualisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang bersinergi dengan KPU kabupaten/kota, badan adhoc penyelenggara Pemilu (PPK, PPS) serta didukung oleh stake holder Pemilu (Partai Politik, Pasangan Calon, Pers, LSM, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat). Adapun akuntabilitas keuangan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.18 Pengukuran Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET %	REALISASI %	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Demokratis							
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	144.136.000	141.501.785	98.17
2	Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	77,50	84,60	109	130,122,000	130,120,900	99.99
3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	75	87,13	116	229,188,000	228,406,915	99.65
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan	75%	-	-	176,134,000	175,443,755	99.60
5	Persentase Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	84,60%	141	67,665,000	67,559,100	99.84

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET %	REALISASI %	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 2. Meningkatnya Pemilu/ Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Aman, Damai, Jujur dan Adil							
6	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95	100	105	386.744.000	240.147.812	62.09
7	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3	0,14	0.04	52.304.000	51.705.875	98.85
8	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86	100	116	75.669.000	74.112.149	97.94
SASARAN 3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan							
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Baik	Baik	1.716.917.000	1.685.860.284	98.19
10	Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik	Baik	Baik	3.884.425.000	3.797.400.481	97.75
JUMLAH TOTAL					6.863.304.000	6.592.259.056	96

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan dan output diatas rata-rata target anggaran, sedangkan untuk target fisik setiap output kegiatan mencapai 100 persen. Untuk output belanja pegawai masih terdapat sisa anggaran yang tidak dapat digunakan, karena disesuaikan dengan keberadaan aparatur sipil negara dalam hal pembayaran tunjangan kinerja dan uang lauk pauk yang bersifat fluktuatif disesuaikan dengan kehadiran pegawai.

Dalam pencapaian sasaran strategis, KPU Provinsi Gorontalo telah berkinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Target realisasi kinerja yang dicapai dari indikator ini 100 persen, sedangkan realisasi anggaran berjumlah 98.17 persen.
2. Persentase partisipasi pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam pemilu/pemilihan kegiatan fisiknya mencapai 109 persen, sedangkan realisasi anggaran 99.99 persen. Khusus untuk persentase partisipasi Pemilih yang datang ke TPS mencapai 84.60 persen dari target nasional 77,50 persen.
3. Persentase partisipasi pemilih perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/Pemilihan dari target nasional yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 75 persen, KPU Provinsi dan Jajarannya sampai ke tingkat KPPS, mampu menaikkan persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tiga Kabupaten sebesar 87,13 persen dengan realisasi kinerja (fisik) 116 persen, sedangkan untuk realisasi anggarannya mencapai 99.65 persen
4. Persentase partisipasi pemilih disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat diukur dikarenakan surat edaran KPU RI nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 sehingga tidak dapat diukur tingkat partisipasi pemilih yang datang ke TPS dari target nasional 75 persen sedangkan realisasi anggaran mencapai 99.60 persen.

5. Persentase pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tiga Kabupaten tingkat partisipasi pemilih mencapai 84.60 persen dari total daftar pemilih tetap yang berjumlah 502.227 orang sedangkan realisasi keuangan 99.84 persen
6. Persentase KPU Provinsi Gorontalo, dan KPU Kabupaten / Kota Se-Provinsi Gorontalo yang melaksanakan pemilu / pemilihan tanpa konflik dapat dicapai realisasi fisik 105 persen, sedangkan realisasi keuangan mencapai 62.09
7. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam penyelenggara pemilu/pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu/pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Untuk provinsi Gorontalo selang tahun 2020 DKPP memberikan sanksi teguran terhadap 5 komisioner Kabupaten Gorontalo atau 0,14 persen, sedangkan untuk realisasi anggaran mencapai 98.85 persen.
8. Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam sengketa hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan jajarannya pada gugatan di mahkamah konstitusi dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dimenangkan oleh KPU Provinsi Gorontalo yang mampu menyampaikan argumentasi dan fakta-fakta hukum dalam sidang majelis. Dari target realisasi kinerjanya mencapai 116 persen atau 100 persen fisik, untuk realisasi keuangan sebesar 97.94 persen.
9. Nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Gorontalo, berupa peningkatan laporan kinerja KPU Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota melalui asistensi pelaporan Kinerja setiap tahunnya, realisasi anggaran yang dicapai oleh KPU Provinsi Gorontalo sebesar 98.19 persen.
10. Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo. Indikator kinerja ini target yang dicapai Baik. Sedangkan untuk realisasi keuangan mencapai 97.75 persen,

BAB IV

PENUTUP

Setiap kementerian/lembaga yang menjalankan tugas dan kewenangan yang diamanatkan dalam undang-undang mengharuskan membuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban setiap tahunnya, yang sudah barang tentu mengacu pada perjanjian kinerja setiap instansi pada tahun berjalan. Pertanggungjawaban ini, mengarah pada rencana strategi masing-masing lembaga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat keberhasilan yang diukur dari target capaian yang telah ditetapkan, selain itu melakukan perbandingan setiap tahunnya.

Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo terurai secara sistematis dalam laporan kinerja yang memuat sasaran strategis dan target indikator kinerja yang akan dicapai selang tahun anggaran 2020. Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja telah digambarkan dalam realisasi anggaran dan fisik yang telah ditetapkan dalam target perjanjian kinerja Tahun 2020 yang realisasinya dalam program dan kegiatan KPU Provinsi Gorontalo dalam rangka mencapai visi dan misi.

Untuk capaian visi dan misi telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dalam mendorong capaian dan sekaligus sebagai bahan pengukur keberhasilan yang telah dicapai sesuai target dalam satu tahun anggaran. Selain capaian selang tahun 2020, KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berada di tiga Kabupaten yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango tanpa ada kendala yang cukup signifikan, tentunya hal ini dibarengi dengan semangat dan kerja keras sehingga membuahkan hasil yang dibuktikan dengan penghargaan yang diraih pada pelaksanaan pemilu/pemilihan selang tahun 2015-2020 antara lain :

1. Keberhasilan dalam partisipasi pemilih pada Pilkada serentak Tahun 2015 sebesar 80,01 % diatas rata-rata nasional.

2. Pada tahun 2017 mendapat penghargaan dari Bawaslu Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Pilkada 2017 terbaik.
3. Dalam hal pembinaan aparat penyelenggara pemilu mendapat terbaik satu kategori tertib administrasi dalam pelaporan penegakan disiplin dan pembinaan SDM
4. Pada tahun 2019 penghargaan dari KPU RI *Terbaik I (satu) kategori Kreatifitas Iklan dan Sosialisasi Pemilu 2019, terbaik I (satu) Tertib Administrasi Dalam Pelaporan, Penegakan Disiplin dan Pembinaan SDM, Terbaik II (dua) Ide Kreatif Digitalisasi data Hasil Pemilu 2019, Terbaik II (dua) Oupload Data Hasil Pemilu 2019* dan mendapat piagam penghargaan dari Bupati Gorontalo sebagai lembaga/kementerian/OPD partipastif dalam mempromosikan senam goyang Mopobibi di Provinsi Gorontalo
5. Pada tahun 2020 KPU Provinsi Gorontalo mendapatkan penghargaan gerakan dukung rekaman KTP – EI terbaik pada pemilihan serentak tahun 2020

Penguatan sumber daya manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh upaya konsolidasi organisasi, koordinasi dan konsultasi. sehingga dapat mewujudkan profesionalitas dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-undang.

LAMPIRAN I

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	77,50%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%
2	Meningkatnya Pemilu/ Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%

		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Gorontalo	Baik
		Reviu Laporan Keuangan KPU Provinsi Gorontalo	Baik

PROGRAM

ANGGARAN

- | | | | |
|---|--|-----|-----------------|
| 1 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya | Rp. | 6.187.815.000,- |
| 2 | Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | Rp | 590.608.000,- |

LAMPIRAN II

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	77,50%	84,60%	109%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	87,13%	116%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Provinsi Gorontalo dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	62,17%	82,89 %
		Persentase Pemilih KPU Provinsi Gorontalo yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	84,60%	141%

2	Meningkatnya Pemilu/ Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105%
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%	0,14%	0.04%
		Persentase KPU Provinsi Gorontalo dalam Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%	100%	116%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Baik	Baik	Baik
		Reviu Laporan Keuangan	Baik	Baik	Baik

RENCANA AKSI PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA (PK)
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KODE ANGGARAN	KEGIATAN / OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	3356.008	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan [Base Line]	10.402.000	10.339.750
				3356,009	layanan Pengadaan Logistik	89.944.000	89.120.835
				3355,008	Pengelolaan Hibah Pemilihan	43.790.000	42.041.200
					INDIKATOR 1	144.136.000	141.501.785
		Persentase Partisipasi Pemilih KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu /Pemilihan	80,00%	3357,010	Dokumen Pemuktahiran Data Pemilih	130.122.000	130.120.900
					INDIKATOR 2	130.122.000	130.120.900
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu/Pemilihan	75%	3364,005	Publikasi Informasi Pemilu	2.107.000	2.106.800
					Supervisi dan monitoring pemilu dan pemilukada	227.081.000	226.300.115

					INDIKATOR 3	229.188.000	228.406.915
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	3364.007	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	108.000.000	107.580.500
					Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	68.134.000	67.863.255
					INDIKATOR 4	176.134.000	175.443.755
		Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60,00%	3358,001	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM.	67.665.000	67.559.100
					INDIKATOR 5	67.665.000	67.559.100
					TOTAL SASARAN 1	747.245.000	743.032.455
2	Meningkatnya Pemilu/Pemilihan KPU Provinsi Gorontalo yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%		Tahapan Pemilihan	362.042.000	215.473.812
				3363,002	Rancangan Peraturan Perundang undangan	24.702.000	24.674.000
					INDIKATOR 6	386.744.000	240.147.812

		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	3363,012	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	22.600.000	22.594.175
				3364,004	Pengelolaan PAW anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota	29.704.000	29.111.700
					INDIKATOR 7	52.304.000	51.705.875
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Gorontalo dan KPU kabupaten/Kota	86%		Layanan Administrasi Kepemiluan	75.669.000	74.112.149
					INDIKATOR 8	75.669.000	74.112.149
					TOTAL SASARAN 2	514.717.000	365.965.836
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Baik	3357,001	Dokumen Perencanaan Anggaran	181.057.000	180.708.325
				3357.004	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	174.510.000	174.086.960
				3358.006	Dokumen Kepegawaian	6.356.000	6.356.000
				3360.010	Pengelolaan Barang Milik Negara	8.200.000	8.188.500

				3360,951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	472.047.000	442.721.800
				3360.994	Layanan Perkantoran	838.818.000	837.930.699
				3358,004	Layanan Pengadaan Pegawai baru	35.929.000	35.868.000
					INDIKATOR 9	1.716.917.000	1.685.860.284
		Reviu Laporan Keuangan	Baik	3355.002	Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU.	17.993.000	17.942.700
				3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	70.400.000	69.197.100
				3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	39.514.000	39.079.900
				3355.994	Layanan Perkantoran	3.740.097.000	3.655.217.181
				3361.005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	16.421.000	15.963.600
					INDIKATOR 10	3.884.425.000	3.797.400.481
					TOTAL SASARAN 3	5.601.342.000	5.483.260.765
JUMLAH TOTAL PAGU ANGGARAN TAHUN 2020						6.863.304.000	6.592.259.056